

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya telah melakukan liberalisasi perdagangan melalui perjanjian ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). Liberalisasi tersebut dimulai dengan pelaksanaan Early Harvest Program (EHP) pada tahun 2004. Gencarnya liberalisasi perdagangan yang saat ini sedang berjalan memberi dampak bagi negara pelakunya baik dampak positif maupun negatif. Salah satu perjanjian liberalisasi yang ditakuti banyak pihak karna akan memberi dampak negatif adalah liberalisasi perdagangan ASEAN China. Ketakutan tersebut muncul karena daya saing produk asal China sangat tinggi dibanding dengan negara lain, khususnya terhadap produk Indonesia. Banyak pihak merasa perlu menunda pelaksanaan liberalisasi dengan China untuk meningkatkan daya saing industri domestik terhadap produk China.

Dalam rangka menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN China Free Trade Agreement/ACFTA), pengusaha dan buruh berdiri di sisi yang sama dalam melakukan penolakan atas implementasi kesepakatan tersebut. Keduanya meradang, karena beratnya konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai akibat diberlakukannya perdagangan bebas itu, baik dari sisi industri yang akan senantiasa terancam karena bersaing dengan industri China, maupun pada wilayah perburuhan yang meliputi regulasi-regulasi yang dapat merugikan buruh. Kelompok buruh dan pengusaha ketika pasar bebas itu begitu luas, terpaksa harus membuat kesepakatan-kesepakatan, bukan berdasarkan

*good will*, tapi karena secara struktural dua-duanya akan rugi. Jadi misalnya, buruh menunda kenaikan upahnya dengan perjanjian kalau pengusaha dapat untung dia akan membuka usaha untuk memasukkan buruh lain.

Sinyalemen negatif perekonomian Indonesia terlihat jelas dengan diimplementasikannya kesepakatan perdagangan bebas diantara negara yang tergabung dalam ASEAN serta antara China dan ASEAN (AFTA dan ACFTA). China akan lebih dominan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN ketika kesepakatan perdagangan bebas China dan ASEAN (ACFTA) diberlakukan. Implikasinya FTA terhadap industri nasional meliputi produk tekstil, baja, makanan dan minuman, produk peternakan, petrokimia, alat-alat pertanian, alas kaki, fiber sintetik, kabel elektronik dan peralatan listrik, industri permesinan, jasa engineering, serta jasa pariwisata, jasa keuangan, pendidikan hingga investasi. Dan kita tahu bahwa semua industri tersebut digerakkan oleh buruh yang tentu saja dalam mekanisme kerja produksi dan mekanisme pasarnya ditentukan dalam sebuah aturan (Undang-undang). Disektor perburuhan, akibat proses deindustrialisasi besar-besaran ini banyak pabrik maupun usaha mikro kecil dan menengah gulung tikar alias bangkrut karena pelaku usaha kecil menengah (UKM) belum siap sepenuhnya menghadapi liberalisasi (perdagangan bebas) itu. Sebab ongkos produksi dan biaya modal (*cost capital*) masih terlalu tinggi. Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya gelombang pasang pemutusan hubungan kerja buruh diseluruh negeri.

Hal ini dapat terbukti, dimana untuk perusahaan atau pabrik tekstil, pada tahun 2009 saja sebelum ACFTA diberlakukan secara efektif, ada sekitar 271 pabrik atau perusahaan tutup karena kalah bersaing, dan akibat dari itu ada

18.396 orang yang menjadi pengangguran akibat PHK. Disamping itu, dari sisi permodalan, Indonesia masih kalah bersaing dengan China. Misalnya, bunga pinjaman yang diterapkan di China berkisar antara 4% sampai 6% per tahun, sedangkan di Indonesia mencapai 14% sampai 16%.<sup>1</sup> Hal ini tentu akan membuat iklim perindustrian di Indonesia akan semakin berat tatkala perdagangan bebas dilakukan tanpa menurunkan suku bunga pinjaman sehingga berdampak pula pada sektor perburuhan. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian tindakan cepat dan sistematis yang harus dilakukan Indonesia bila ingin melaksanakan perdagangan bebas ASEAN-China tersebut.

Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menganalisis apakah ada pengaruh dari Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terhadap Politik Perburuhan di Indonesia melalui judul:

***“Pengaruh ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Gerakan Kaum Buruh di Indonesia”***

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai lewat penelitiannya, yaitu:

1. Penulis ingin menganalisa apa pengaruh yang ditimbulkan oleh Perdagangan Bebas ASEAN-China Terhadap Politik Perburuhan Di Indonesia.
2. Penulis berharap bahwa dengan teori-teori yang sudah dipelajari bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang politik dan Ilmu Hubungan Internasional.

---

<sup>1</sup> . *Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA: Berdagang untuk Siapa?* Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 8, Februari – Juni 2010, hal. 18

### C. Latar Belakang Masalah

ASEAN (*Association of Shoutheast Asia Nations*) merupakan organisasi Geo-politik dan Ekonomi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunai Darussalam, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos dan Kamboja. Pembentukan organisasi regional ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral antar negara di kawasan Asia Tenggara bentuk kerjasama antar negara itu meliputi; bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dan perdamaian antar negara ASEAN.<sup>2</sup> Adapun pembahasan selanjutnya akan menitikbertakan pada kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai sebuah kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi, daya saing didalamnya terdapat aliran bebas dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin berkurang.

Perkembangan global yang di alami oleh ASEAN menjadikan kawasan ini perlu melakukan kerjasama ekonomi di dunia internasional, mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara-negara lain di luar kawasan. Hal ini agar berbagai peluang kerjasama dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ASEAN untuk bersaing secara internasional, disamping itu ASEAN harus dapat menjadi pasar yang menarik bagi investasi asing. Melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas (*free Trade Area/ FTA*) ASEAN melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara mitra seperti Jepang, China, Korea, Australia, Selandia Baru dan india. Dalam kerjasama ini pula

---

<sup>2</sup>. <http://www.anneahira.com/sejarah-asean.htm>, di akses tanggal 1 Mei 2012 pk1.20.41 wib

setiap negara anggota ASEAN dapat melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang menjadi mitra ASEAN tersebut.

Dari beberapa mitra ASEAN, Cina merupakan negara yang mengalami perkembangan paling pesat. Pasca reformasi Deng Xio ping, Cina mengalami kemajuan yang sangat besar terutama dalam bidang ekonomi.<sup>3</sup> Faktanya saat ini Cina telah menjadi salah satu negara penggerak perkeonomian dunia. Hal ini terlihat pada produk-produk China yang telah mampu menjangkau berbagai belahan dunia. Selain luasnya wilayah perdagangan China juga memiliki kelebihan dimana harga produk yang di tawarkan jauh lebih murah. Disamping itu China memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan kemajuan teknologi serta infrastruktur lainnya yang tentu saja dapat menunjang kemajuan negara ini.

ACFTA awalnya dimulai ketika pada tahun 2001 digelar *ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong.<sup>4</sup> Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati "*Framework Agreement on Comprehensive*

---

<sup>3</sup>. *Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA: Berdagang untuk Siapa?* Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 8, Februari – Juni 2010, hal. 9

<sup>4</sup>. <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia> di akses tanggal 1 Mei 2012 pk1 20.34 wib

*Economic Cooperation” (CEC), yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.<sup>5</sup>*

Dalam prosesnya, ditandatangani berbagai kesepakatan seperti; Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the association of Southeast Asian Nations and The Peoples Republic of China (ACFTA) 4 November 2004 di Phenom Penh, Kamboja oleh para kepala negara ASEAN dan RRC. Khusus Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ACFTA telah ditandatangani pada 29 November di Vientiane, Lao PDR, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Agreement ini mencantumkan the Early Harvest Programme (EHP), tujuan EHP adalah mempercepat implementasi penurunan tarif barang. Agreement on Trade in Goods tersebut mencakup pengurangan atau penghapusan tarif barang yang dibagi dalam dua kategori yaitu: Normal Track dan Sensitive Track di luar EHP. Tarif lines yang telah didaftar oleh masing-masing pihak sesuai ACFTA harus dihapuskan paling lambat pada 1 Januari 2012 untuk kelompok ASEAN 6 and China dan 1 Januari 2018 untuk kelompok Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietniam (CLMV).<sup>6</sup>

Sebelum ditandatanganinya ACFTA, Indonesia adalah negara yang paling aktif dalam mengungkap agenda-agenda liberalisasi ekonomi baik perdagangan, investasi dan keuangan. Indonesia menjadi pendukung utama penggunaan strategi pasar bebas dalam menyelesaikan masalah ekonomi global saat ini. Sikap Indonesia tersebut terekam jelas dalam perundingan WTO, G20 dan perundingan perubahan iklim di Kopenhagen. Tindak lanjut dari itu adalah berbagai peraturan perundangan disahkan dalam rangka mendukung liberalisasi ekonomi, mulai dari UU BI, UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Minerba, termasuk UU Perburuhan dan berbagai peraturan lainnya. Seluruh perangkat tersebut dibuat setelah terlebih dahulu melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

---

<sup>5</sup>. *Ibid* .

<sup>6</sup> . Henry Gao, *Strategi China dalam Free Trade Agreement: Pertarungan Politis Atas Nama Perdagangan*, Penerbit Institute for Global Justice (IGJ), hal.62

Kesepakatan antara ASEAN sebagai sebuah kawasan Free Trade Area dengan China melalui Free Trade Agreement (FTA) adalah kesepakatan yang tidak hanya menyangkut aspek perdagangan barang, akan tetapi termasuk jasa, investasi dan bahkan melibatkan komitmen utang luar negeri. FTA merupakan kesepakatan yang jauh lebih menyeluruh dibandingkan dengan WTO dan menganut prinsip aliran barang bebas, aliran jasa bebas, aliran tenaga kerja bebas dan aliran modal bebas. Maraknya FTA sebagai suatu strategi perdagangan tidak dapat dilepaskan dari kebuntuan dalam perundingan WTO. Akibatnya banyak negara atau kawasan di dunia membuat FTA dengan aturan yang relative sama bahkan lebih komprehensif. FTA ASEAN sendiri tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya ASEAN yang awalnya merupakan suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang diciptakan dalam rangka membendung pengaruh Uni Soviet dan China. ASEAN akhirnya menjadi lahan rebutan bagi negara industri AS, UE, Jepang dan selanjutnya juga China dalam rangka pencarian sumber daya alam dan ekspansi pasar. Kedua hal ini dianggap sebagai strategi utama untuk mengatasi krisis kapitalisme yang ada.

Sejak perjanjian ACFTA mulai diberlakukan tentunya Negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah

mengawali dengan meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.<sup>7</sup>

Keputusan presiden no.48 tahun 2004, pasal 1 :

Mengesahkan *framework Agreement on comprehensive Economic cooperation between the association of South East Asian Nations and the people's Republik of Cina* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan republic rakyat China), yang telah ditanda tangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom penh, Kamboja, apada tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang salinan naskah aslinya dalam bahasa inggris dan terjemahannya terlampir pada keputusan presiden ini.<sup>8</sup>

Perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang telah diberlakukan mulai 1 Januari 2010 telah menimbulkan kegamangan bagi dunia usaha di tanah air.<sup>9</sup> Meski perjanjian ini telah ditandatangani sejak Delapan tahun yang lalu, sayangnya pemerintah Indonesia tidak cukup serius melakukan berbagai persiapan dalam menyambut diberlakukannya perjanjian tersebut. Ada banyak persoalan dalam negeri yang akan muncul dikarenakan Indonesia tidak kompetitif jika harus bersaing dengan China. Persoalan yang lainnya adalah ketiadaan pekaan negara pada sektor politik perburuhan, seperti undang-undang jaminan sosial melalui Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang kontroversial itu meski sudah disahkan oleh DPR RI namun

---

<sup>7</sup>. Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004*, 15 juni 2004.( <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf>) diakses tanggal 22 November 2011 pukul 20.00 wib

<sup>8</sup>. *Ibid.*

<sup>9</sup>. Henry Gao, *Strategi China dalam Free Trade Agreement: Pertarungan Politis Atas Nama Perdagangan*, Penerbit Institute for Global Justice (IGJ), hal.72

baru akan di terapkan pada tahun 2015, lemahnya infrastruktur dan tingginya biaya transportasi serta menguatnya gejala deindustrialisasi.

Dampak langsung dari pemberlakuan ACFTA di Indonesia yang dirasakan oleh kaum buruh memang masih menjadi perdebatan banyak pihak. Namun, pengetatan dan efisiensi industri yang dilakukan pengusaha Indonesia yang berdasarkan pada regulasi yang ada, menyebabkan standar dan kualitas kesejahteraan kaum buruh menurun drastis. Daya serap tenaga kerja oleh industri nasional Indonesia juga menurun tajam. Kondisi inilah yang menyebabkan persaingan yang tinggi antara tenaga kerja dan angkatan kerja.<sup>10</sup> Kaum buruh Indonesia dihadapkan pada dilema, dimana kesempatan dan lapangan kerja yang menyempit menyebabkan kaum buruh tidak dapat menegosiasikan tuntutan peningkatan kesejahteraan kepada pengusaha. Persaingan yang ketat tersebut mendorong pengusaha lebih memilih menggunakan sistem kerja kontrak dan menggunakan tenaga outsourcing untuk mengurangi beban biaya produksi.

Efisiensi industri jelas menyebabkan kaum buruh terancam PHK. Selain itu, peningkatan standar upah sebagai salah satu indikator kesejahteraan kaum buruh menjadi sangat lambat. Terbukti, rata-rata peningkatan UMP dan UMK di seluruh Indonesia dalam setiap tahunnya tidak lebih dari 10% dari UMP dan UMK tahun sebelumnya.<sup>11</sup> Dari sisi investasi, investasi China dalam industri energi dan perkebunan tidak mampu meningkatkan daya serap tenaga

---

<sup>10</sup> . *Produk China di Setiap Lini, Produk Indonesia Sulit Bersaing Akibat Harga Bahan Baku Tinggi*, Kompas, Senin, 11 April 2011, hal. 1

<sup>11</sup> . Rifky Indrawan, *CAFTA Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Kaum Buruh*, <http://suarakomunitas.net/baca/10100/cafta-dan-dampaknya-bagi-kesejahteraan-kaum-buruh.html>, di unduh pada 25 Februari 2012.

kerja ke dalam industri-industri tersebut. Pasalnya, industri energi yang di kedepankan China merupakan industri berteknologi yang tidak menginginkan tenaga kerja Indonesia yang umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sementara, tenaga kerja Indonesia lebih memilih menjadi buruh migran ketimbang bekerja di sektor perkebunan yang di investasikan China karena nilai upah yang akan diterima sangat rendah.

Politik upah murah dan sistem kerja temporer (sistem kerja kontrak dan outsourcing) merupakan paket kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemberlakuan ACFTA. Hasilnya adalah standar kesejahteraan kaum buruh disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Karena kondisi industri nasional Indonesia sedang dalam posisi terdesak karena adanya persaingan didalam industri, maka kesejahteraan kaum buruh ikut terdesak untuk segera diefisienkan dengan cara menekan upah buruhnya, demi meningkatkan “daya saing” perusahaan.<sup>12</sup>

Konsekwensi yang harus dijalani saat ini adalah Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara ASEAN dan Cina. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN dengan Cina, yang disebut dengan *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA). Produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga tahun. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki

---

<sup>12</sup>. Ken Budha Kusumandaru, *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme*, Penerbit Resist Book, Yogyakarta, 2004. Hal. 188

kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara ASEAN dan Cina.

Beberapa kalangan menerima pemberlakuan ACFTA sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada juga yang menolaknya karena dipandang sebagai ancaman. Dalam ACFTA, kesempatan atau ancaman ditunjukkan bahwa bagi kalangan penerima, ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan memiliki pemasukan tambahan dari PPN produk-produk baru yang masuk ke Indonesia. Tambahan pemasukan itu seiring dengan makin banyaknya obyek pajak dalam bentuk jenis dan jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Beragamnya produk China yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen (penduduk / pedagang Indonesia).

Bila kalangan penerima memandang ACFTA sebagai kesempatan, kalangan yang menolak memandang ACFTA sebagai ancaman dengan berbagai alasan. ACFTA, di antaranya berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri merupakan imbas dari membanjirnya produk China yang ditakutkan dan memang sudah terbukti memiliki harga lebih murah. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun dari kedua pendapat di atas, yang patut di ditekankan kondisi obyektifnya adalah diman sejak awal pemberlakuannya, ternyata ACFTA mendapatkan respon negatif dari banyak kalangan antara lain respon penolakan datang dari kaum buruh, dan penolakan ini adalah salah satu bentuk perjuangan politik yang mereka lakukan. Ribuan buruh dari Keluarga Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) se-Jabodetabek dalam demonya di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (3/4/2010) mengajukan sepuluh tuntutan. Antara lain menolak pasar bebas ASEAN dengan China untuk melindungi industri nasional yang terus terpuruk. Sepuluh tuntutan yang diajukan itu adalah menegakkan keadilan dan kedaulatan ekonomi untuk pekerja dan rakyat, menolak kenaikan tarif dasar listrik, menolak ACFTA untuk melindungi industri nasional.<sup>13</sup>

Di Jawa tengah, Ribuan buruh disana pun tak kalah ketinggalan, kaum buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) ini, langsung dihadang ratusan petugas kepolisian, di depan gerbang kantor DPRD Jawa Tengah. Para buruh menolak pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas antara negara ASEAN, termasuk Indonesia dengan China.<sup>14</sup> Ribuan buruh dari Jawa Timur, Kamis (21/1/2010) pun melakukan hal yang sama, mereka menggelar aksi turun ke jalan menolak implementasi kesepakatan bersama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dengan China (ACFTA). Menurut mereka, ACFTA menjadi ancaman serius bagi para buruh karena dikhawatirkan produk-produk dalam negeri nantinya kalah bersaing dengan

---

<sup>13</sup> . <http://www.seruu.com/artikel.php?sec=13&cat=90&postid=18112>, di akses pada tanggal 30 September 2012

<sup>14</sup> .[http://www.indosiar.com/fokus/demo-buruh-tolak-acfta-berlangsung-ricuh\\_84832.html](http://www.indosiar.com/fokus/demo-buruh-tolak-acfta-berlangsung-ricuh_84832.html), di akses pada tanggal 30 September 2012

produk-produk China yang semakin membanjiri pasar domestik.<sup>15</sup> Ribuan buruh Di Jawa Barat, yang tergabung dalam organisasi buruh mengadakan aksi demonstrasi sebagai wujud perjuangan politik mereka dalam rangka menolak pemberlakuan ACFTA yang sudah pasti akan berdampak pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk diberlakukan pada setiap perusahaan-perusahaan sehingga berdampak pada kaum buruh di Indonesia. Dalam orasinya mereka mengatakan dari 8000-an pabrik yang ada di Jawa Barat, sudah ratusan pabrik tutup karena situasi tersebut.<sup>16</sup> Dan gelombang penolakan atas kebijakan kerjasama ASEAN-China ini juga dilakukan oleh kaum buruh diluar Jawa seperti Sulawesi dan Sumatera.

Ternyata bukan hanya serikat-serikat buruh saja yang melakukan unjuk rasa, meski hanya dalam bentuk statemen para pengusaha yang ada di Jawa Barat mengatakan bahwa tidak kurang dari 131 perusahaan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di sekitar Jawa Barat berencana untuk merumahkan karyawannya. Pasalnya, produk dari 131 industri TPT itu kalah bersaing dengan produk China yang dijual dengan harga sangat murah di dalam negeri. Hal itu dikatakan anggota DPR Komisi VI, Lili Asdjuredja kepada *tubasmedia.com* di ruang kerjanya pekan silam. Rencana aksi merumahkan karyawan itu katanya tidak akan dilakukan secara serentak, namun bertahap untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Kepada pemerintah kata Lili sudah diinformasikan rencana aksi dari ke-131 industri TPT tersebut.

---

<sup>15</sup>.<http://www.simpuldemokrasi.com/tolak-acfta-buruh-gelar-demo-di-dprd-jatim.html>, di akses pada tanggal 30 September 2012

<sup>16</sup>. <http://www.google.co.id/search?q=dampak-acfta-40000-buruh-di-jabar-terancam-kena-phk-&oq=dampak-acfta-40000-buruh-di-jabar-terancam-kena-phk>, di akses pada tanggal 30 September 2012

Menjawab pertanyaan dikatakan, rencana aksi merumahkan karyawan tersebut harus dicegah dan jangan dibiarkan sampai terlaksana. Dengan cara apapun katanya, tindakan merumahkan karyawan saat ini sangat beresiko berat kendati alasan pihak perusahaan dapat diterima akal. “Memang benar pengusaha TPT nasional kini kewalahan menghadapi gempuran produk Cina yang dijual di Indonesia dengan harga yang amat murah,” kata Lili. Sebenarnya menurut Lili, ditinjau dari biaya produksi, produk Cina jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Dari perbedaan tingkat suku bunga saja, Cina yang hanya 5,7 persen sudah pasti lebih unggul dibanding produk Indonesia yang tingkat suku bunganya 14 persen. Belum lagi fasilitas lain seperti keringanan pajak misalnya. “Ditambah lagi dengan pengadaan infrastruktur yang mendukung sektor industri, sebagian besar produk Cina sulit kita kalahkan dan produk Cina itu semakin merajalela dengan menggunakan instrumen pasar bebas ASEAN-China (ACFTA)” kata Lili. Untuk itu kata Lili, pemerintah harus segera bertindak menyurati WTO (*World Trade Organization*) menceritakan dampak negatif kebijakan ACFTA terhadap kelangsungan hidup industri di Indonesia dan sebagainya. “Kebijakan CAFTA untuk Indonesia harus ditinjau ulang asal pemerintah mau secara terbuka mengakui efek negatifnya. Lihat itu di Jawa Barat, banyak industri TPT yang mengeluh,” katanya.<sup>17</sup>

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun angkat bicara. Karena sampai saat ini mayoritas industri tekstil di Indonesia berada di Jawa Barat, demikian pula volume ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagian besar berasal dari Jawa Barat. Deddy Widjaya yang

---

<sup>17</sup>.<http://www.tubasmedia.com/berita/131-industri-tpt-berencana-merumahkan-karyawan/>, di akses pada tanggal 30 September 2012

merupakan ketua dari Apindo Jawa Barat mengatakan, jika pengusaha saat ini dihadapkan dengan ACFTA maka sekitar 20-30 persen dari 8000 anggota Apindo Jabar terancam gulung tikar, dan itu berimbas pada PHK massal. Ia juga menyebutkan, bahwa ekspor Cina saat ini sudah menguasai sekitar 24 persen pasaran di ASEAN. “Bila ACFTA tetap digulirkan, akan dilematis bagi industri nasional. Menembus ekspor akan sulit karena rendahnya daya saing. Sementara itu Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan menyatakan akan mendorong agar aspirasi para pengusaha dan buruh untuk menunda pemberlakuan ACFTA direspon oleh pemerintah.

Gubernur Jawa Barat juga mengatakan bahwa “Kondisinya jelas kurang menguntungkan bagi industri, khususnya yang ada di Jawa Barat. Kita belum siap masuk pasar bebas, di lain pihak hal itu sudah menjadi sebuah keniscayaan di masa mendatang,” kata Heryawan. Ia menyebutkan, upaya penundaan pemberlakuan ACFTA perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan beberapa sektor industri yang dipastikan terpuak oleh perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan Cina itu. Sementara itu DPRD Jawa Barat telah berkirin surat kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk mengupayaan penundaan pelaksanaan ACFTA. “Kami tidak ingin Jabar dilanda PHK massal akibat banyaknya industri yang gulung tikar,” kata Ketua Komisi E DPRD Jabar, Syarif Bastaman.<sup>18</sup> Kondisi obyektif dari penjelasan diatas merupakan indikator bahwa kebijakan pemerintah dalam

---

<sup>18</sup> . <http://gaul.solopos.com/dampak-acfta-40000-buruh-di-jabar-terancam-kena-phk-11220.html>, di akses pada tanggal 30 September 2012

menjalankan pasar bebas ASEAN-China sangat memberikan dampak pada politik perburuhan di Indonesia.

Untuk dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini maka peneliti membuat skripsi dengan judul **“Pengaruh ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Gerakan Kaum Buruh di Indonesia”**

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut maka dapat di rumuskan suatu pokok permasalahan yaitu:

*Bagaimana Pengaruh Perdagangan Bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Gerakan Kaum Buruh di Indonesia?*

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam upaya menjawab pokok permasalahan dan menarik hipotesa, penulis menggunakan pendekatan yang relevan, yaitu teori Rejim Internasional dan teori globalisasi pasar bebas yang akan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Teori Rezim Internasional**

Dalam dunia politik dan kenegaraan, kata Rezim pasti sudah lumrah didengar dan seringkali dicetuskan untuk menggambarkan penguasa yang memimpin pada era tertentu, seperti Rezim Soeharto, Rezim Marcos, Rezim Mubarak, dan seterusnya. Dalam konteks hubungan internasionalpun, kita juga mengenal adanya Rezim Internasional.

Banyak para pemikir dan ahli politik seperti Stephen D. Krasner, Oran Young, Raymond Hopkins, Donald Puchala, Robert Jervis dan Robert O. Keohane yang sebagian besar sudah mencoba mendefinisikan dan membahas isu rezim internasional dalam esai yang mereka buat. Krasner misalnya yang

berpendapat bahwa rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional.<sup>19</sup>

Dalam pengertian diatas, ada empat kata kunci yang perlu kita cermati yaitu: pertama, kata 'prinsip' disini diartikan sebagai kepercayaan terhadap nilai-nilai yang didalamnya terkandung kenyataan, sebab-akibat, dan kejujuran. Selanjutnya kata 'norma' dalam konteks diatas adalah standard perilaku yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan. Kemudian kata 'peraturan' sendiri bermakna himbauan atau saran yang spesifik bagaimana sebaiknya tindakan dilakukan. Kemudian terakhir 'prosedur pembuatan keputusan' yaitu praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok. Seperti judul artikel yang dibuat Krasner, ia juga mengistilahkan rezim internasional sebagai suatu variabel intervensi antara 'basic causal factors' dan behavior atau outcome. Senada dengan Krasner, Oran Young, Raymond Hopkins dan Donald Puchala mengatakan bahwa memang ada hubungan yang erat antara rezim internasional dengan perilaku para aktor-aktor internasional. Namun perbedaan pandangan muncul dari Susan Strange yang berpendapat bahwa rezim internasional adalah misleading concept atau konsep yang malah mengaburkan hubungan antara ekonomi dan kekuasaan. Namun perbedaan asumsi ini tidak berpengaruh begitu besar karena pada intinya semua ilmuwan tersebut sepakat bahwa rezim internasional membuat sistem

---

<sup>19</sup>. Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 87

internasional bagaikan fungsi simetris, oleh karena itu setiap aktor perlu dan dapat memaksimalkan power yang dimilikinya dalam dunia yang anarki.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, suatu rezim internasional biasanya diorganisasikan dengan perjanjian antar negara yang terlibat, sehingga ia dapat menjadi sumber utama hukum internasional yang sah. Karena itu dalam suatu rezim, para negara anggota yang berada di dalamnya dapat saling mengontrol perilaku negara lainnya. Dalam hal ini ia menjadi subjek hukum internasional dan turut membentuk perilaku atau outcome negara-negara yang menyusunnya. Contoh dari rezim internasional yaitu United Nation on The Law of The Sea, Nuclear Non-Proliferation Treaty, Framework Conention on Global Climate Change dan termasuk ASEAN-China (ACFTA). Jadi berdasarkan penjelasan diatas, fungsi dari rezim internasional adalah information-providing, reducing transaction cost, menanggulangi serta mencegah information-asymmetries, serta menyediakan principles, aturan, asas kerjasama, dan lain sebagainya.

Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) ini, teori rezim internasional sangat erat sekali hubungannya dengan wilayah politik perburuhan khususnya di Indonesia, yang akan menentukan sejauh mana tingkat kesejahteraan dan posisi kaum buruh. Sebagai contoh sebuah organisasi kerjasama perdagangan di Amerika Utara (NAFTA), dalam buku Joseph E. Stiglitz *Making Globalisation Warm*, menjelaskan bahwa tadinya banyak para ekonom percaya dengan adanya NAFTA (perjanjian perdagangan bebas Amerika utara) yang meliputi 376 juta penduduk akan menyebabkan bertambahnya kemakmuran dan berkurangnya ketidakseimbangan ekonomi AS

---

<sup>20</sup> . <http://moze91.wordpress.com/2011/04/19/rezim-internasional/>, di unduh pada 30 September 2012, pukul 10.06 WIB.

dan Meksiko. Faktanya, 10 tahun kemudian kesenjangan *income* antara Amerika Serikat dan Meksiko justru bertambah 10 persen. Di Amerika 765.000 orang kehilangan pekerjaan karena NAFTA. Selain itu menyebabkan upah buruh menurun rata-rata 23 persen dalam periode 1995-1999. Sehingga akhirnya presiden Obama menjanjikan untuk melakukan renegotiasi terhadap perjanjian NAFTA. “Kebijakan Obama ini dapat dijadikan contoh oleh pemerintah Indonesia, jika memang perjanjian ASEAN-Cina (ACFTA) justru merugikan Indonesia, maka perlu dilakukan renegotiasi.”<sup>21</sup>

Dan yang harus sadari bahwa akan selalu ada perubahan dalam rezim internasional itu sendiri yang terkadang disebabkan karena ada interaksi yang saling mempengaruhi antara suatu rezim terhadap rezim lainnya sehingga perilaku dan outcome kadang berbeda. Rezim internasional pada dasarnya bersifat dinamis dan berubah, namun perubahan yang terjadi dalam rezim internasional tidak hanya sekedar susunan temporer yang bersifat adhoc melainkan ia berusaha untuk memfasilitasi terciptanya suatu agreement substantive-specific dan pengganti hegemoni dominan yang mengalami decline dalam beberapa fungsinya. Untuk mengenali perubahan yang terjadi pada rezim maka perlu dibedakan keempat unsur diatas menjadi dua yakni, prinsip dan norma di satu sisi, sementara peraturan dan prosedur di sisi lain. Sisi pertama merupakan karakter dasar yang menciptakan suatu rezim, sehingga perubahan di dalamnya akan berdampak pada peraturan dan prosedur atau secara *gamblang* merubah rezim itu sendiri. Sedangkan sisi yang kedua hanya merupakan unsur yang senantiasa berubah dan diperbaiki, sehingga perubahan

---

<sup>21</sup> . *Ibid.*

yang terjadi di dalamnya tidak akan sampai merubah rezim itu sendiri. Adapun penyebab perubahan pada rezim disebabkan karena adanya 5 faktor basic causal yakni:

- Kepentingan diri sendiri yang bersifat egois
- Kekuatan politik
- Norma dan prinsip
- Kebiasaan dan tradisi
- Pengetahuan

Rezim internasional berkembang pesat sejak periode Perang Dunia II. Bahkan, sekarang rezim meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan interaksi dan koordinasi antar negara. Dia bersifat mengikat suatu negara agar selalu mematuhi layaknya hukum. Sehingga bagi studi Hubungan Internasional, rezim merupakan hal yang tidak terbantahkan sumbangannya bagi studi tersebut. Karena rezim disini berhasil menjawab alasan-alasan mengapa dan bagaimana cara mempertahankan kesepakatan yang telah dicapai beberapa negara, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata nuklir atau kerjasama pertahanan kolektif), perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan, dan lain sebagainya.

## **2. Teori Globalisasi Pasar Bebas**

Jika ditinjau dari etimologi, globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga

batas-batas suatu negara menjadi bias.<sup>22</sup> Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasional sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.<sup>23</sup>

Secara ekonomi, globalisasi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sebuah sistem ekonomi global.<sup>24</sup> Namun jika dilihat dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjadikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, globalisasi sesungguhnya adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh mereka dari kalangan ilmuwan Marxis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta bagi kalangan yang melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah dicurigai sebagai bungkus baru dari imperialism dan kolonialisme.

Ada mekanisme dan struktur ekonomi yang dikembangkan selain dari pada forum perundingan dalam sistem globalisasi, yang sesungguhnya tidak ada

---

<sup>22</sup>. “Definisi globalisasi”, [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_globalisasi\\_info2058.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_globalisasi_info2058.html), diakses pada tanggal 21 Mei 2012

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup>. DR. Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Penerbit Insist Press, Yogyakarta, 2001 hal. 211

kaitannya dengan janjinya sebagai proses ekonomi global untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia secara global. Ada sejumlah elemen yang merupakan anatomi dari globalisasi. Pertama, adalah penciptaan mekanisme globalisasi sistem dan proses produksi. Konsolidasi sistem fabrikasi dunia pada dasarnya merupakan usaha penciptaan hirarki jaringan produksi dan perdagangan dengan skala global dari perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs). Proses ekspansi sistem produksi global ini dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian Zone Proses Ekspor (Export Processing Zone atau EPZs).<sup>25</sup> EPZ, adalah suatu wilayah negara yang dikhususkan sebagai ekspor industry dengan syarat mampu dan mau mengembangkan aturan dunia minimal yang menyangkut aturan perburuhan dan pajak domestik sehingga menjadi daya tarik Transnasional Corporations untuk beroperasi.

Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) menjadi bagian inheren dengan EPZs yang sudah lama dijalankan di wilayah negara-negara dunia ketiga khususnya Indonesia yang memiliki standar upah buruh yang murah berikut aturan-aturan perburuhan yang dirasakan jauh dengan kesejahteraan bagi para kaum buruh yang ada. Itulah makanya sebagian besar tenaga kerja wilayah EPZs ini adalah buruh perempuan. Mirip dengan strategi EPZ adalah apa yang dikenal dengan *Global Labour Force* yang dikembangkan melalui spesialisasi dan menjadi devisi buruh seperti bekerja dalam pabrik berskala global, yang dikembangkan melalui konsep internasional.

Berbicara tentang realisasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) sebenarnya tidak lepas pula dari isu integrasi ekonomi regional dalam

---

<sup>25</sup> . Ibid. hal.213

hal ini wilayah Asia Tenggara dan China yang setidaknya dapat menjadi wilayah pasar bebas. Dan diupayakan melibatkan penciptaan satu tatanan ekonomi dunia yang tidak hanya merupakan totalitas dari perekonomian nasionalnya, melainkan sebuah realitas independen yang kokoh. Aliran modal, komoditas, teknologi dan tenaga kerja berskala besar dan berjangka panjang melintasi perbatasan negara. Hal ini tidak lepas dari tuntutan globalisasi yang semakin populer dalam percaturan politik internasional.<sup>26</sup>

Integrasi perekonomian sebenarnya telah terjadi sebelumnya di beberapa wilayah dunia antara lain Amerika Utara, Uni Eropa dan Negara-negara Balkan (Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Yunani, Republik Macedonia, Serbia dan Montenegro, Turki).<sup>27</sup> Dibandingkan dengan Eropa dan Amerika, Asia Timur adalah orang-orang baru dalam “pemburu emas” perdagangan bebas (FTA). Dalam proses ini, China memainkan peranan penting. Hal ini tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi China, tetapi juga karena China telah mengambil strategi untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan. Demi keuntungan negara-negara di kawasan, sangatlah penting untuk memahami strategi FTA China.<sup>28</sup> Bella Balasa menyatakan bahwa aktifitas regionalism merupakan rangkaian proses yang cukup panjang yang terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>. “Globalization Definition Theory and Aproach”, <http://inimedya.com>., dalam <http://www.20search.com>., diakses pada tanggal 7 Februari 2012.

<sup>27</sup>. “Yang termasuk negara-negara balkan” [http://id.wikipedia.org/wiki/ Kategori: Negara\\_Balkan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Negara_Balkan), diakses pada tanggal 21 Mei 2012

<sup>28</sup>. Henry Gao, *Strategi China dalam Free Trade Agreement: Pertarungan Politis Atas Nama Perdagangan*, Penerbit Institute for Global Justice (IGJ), hal.41

<sup>29</sup>. Bella, Walden, *De Globalisasi: Gagasan-Gagasan Ekonomi Dunia Baru*, Penerbit Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2004, hal.27.

- a. Wilayah perdagangan bebas (*free trade area*).
- b. Penyesuaian aturan bea cukai (*customs union*).
- c. Pasar bersama (*common market*).
- d. Persatuan ekonomi (*common union*).
- e. Integrasi ekonomi total (*total economic integration*).

Bertolak dari penerapan konsep wilayah perdagangan bebas terlihat bahwa integrasi ekonomi yang lebih tinggi tersebut wujud nyatanya adalah sebuah kondisi yang dinamis dimana semua hambatan, baik tarif dan non-tarif yang berlangsung dalam lalu-lintas perdagangan diantaranya sesama anggota asosiasi tertentu di hilangkan, sedangkan sikap atau perlakuan terhadap negara-negara di luar anggota, biasanya setiap anggota bebas menentukan sesuai pertimbangan bilateral masing-masing.

Kesemuanya dari globalisasi pasar bebas, kemudian merujuk pada apa yang disebut dengan liberalisme dan neo-liberalisme karena intisari dari pasar bebas adalah melemahkan kontrol negara terhadap perekonomian pasar dan kemudian berkembang ke arah sosial-ekonomi secara makro. Liberalisme merupakan faham atau ideologi penting yang turut memberikan pemikiran-pemikiran bagi dinamika percaturan politik internasional. Secara harfiah liberalisme merupakan sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan merupakan kiblat (fokus) dari nilai politik yang dominan.<sup>30</sup>

Neo-liberalisme memiliki keterkaitan yang kuat dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan, misalnya

---

<sup>30</sup> . “Liberalisme”, <http://www.id.wikipedia.org.>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2009.

WTO (*World Trade Organizations*) ataupun juga Bank Dunia (*World Bank*). Dalam perkembangannya, neo-liberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah, seperti halnya paham Keynesianisme dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>31</sup>

Neo-liberalisme dipandang bertentangan dengan sosialisme karena paham ini berupaya meningkatkan efisiensi korporasi melalui upaya kerasnya untuk menolak atau mengurangi kebijakan di sektor politik perburuhan seperti hak-hak buruh meliputi upah minimum, serta hak-hak daya tawar kolektif lainnya.

Strategi gerakan sosial menjadi pilihan bagi banyak kaum buruh yang ada di Indonesia dalam rangka memperjuangkan hak-hak politik mereka, secara perlahan mereka akan menyadari bahwa bukan negara yang menjadi penyebab dari masalah perburuhan, melainkan adanya kebijakan global yang selalu mengontrol kebijakan negara. Walau banyak serikat buruh yang pada awalnya kurang mencermati hubungan neoliberalisme dengan kebijakan negara. Akan tetapi bangunan kesadaran kritis yang mereka lakukan telah membawa sedikit banyaknya perubahan. Salah satu contoh dapat terlihat perjuangan politik kaum buruh pada saat perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China mulai diberlakukan pada awal 2010 yang dapat menimbulkan kegalauan bagi dunia usaha sehingga dikhawatirkan mampu menghancurkan sendi-sendi industri didalam negeri yang jelas akan berdampak negatif pada sektor perburuhan di Indonesia.

---

<sup>31</sup> . “Neo-Liberalisme”, *Microsoft Encarta Dictionary*, Free Ensiklopedia, CD Room, 2012.

Tetapi lain hal bagi banyak serikat buruh, tidak cukup hanya dengan menunjukkan sikap perlawanannya terhadap kebijakan neoliberalisme. Memperoleh kehidupan yang layak adalah dasar tujuan mereka. Maka perlawanan terhadap neoliberalisme terus mereka lakukan dengan cara bagaimana dapat mengubah kebijakan negara agar selalu berpihak pada kepentingan kaum buruh. Karena dengan adanya perubahan dalam sebuah kebijakan oleh negara yang berpihak pada kaum buruh, maka disitulah secara perlahan perubahan terjadi dalam hubungan antar negara dengan rakyat.

Meski harus disadari bahwa dalam realitasnya banyak yang tidak berhasil dalam mengubah setiap arah kebijakan, tetapi gerakan sosial yang dibangun oleh kaum buruh sedikit membuahkan hasil, minimal mereka terlibat didalam tatanan posisi politik dipemerintahan, seperti keikutsertaan beberapa serikat buruh dalam mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan upah, ikut andil dalam penentuan upah minimum provinsi/ kota melalui lembaga dewan pengupahan daerah.

Secara fundamental neo-liberalisme dengan tiga faham kontemporer, masing-masing, yaitu :<sup>32</sup>

- a. Sosialisme.
- b. Proteksionisme.
- c. Environmetalisme.

Perkembangan dari neo-liberalisme moderen bermula dari krisis minyak dunia tahun 1973, yang tidak lepas dari intervensi dan dukungan

---

<sup>32</sup> . *Ibid.*chapter iii.

Amerika Serikat terhadap Israel. Secara konseptual paham ekonomi-liberal disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

Makna penting dari neo-liberalisme adalah bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan kebebasan sebagai pembedanya. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus yang sederhana, antara lain penentuan gaji pegawai, upah buruh, dan lain-lainnya yang dianggap dapat mengganggu neoliberalisme. Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan dari pokok permasalahan dan kerangka dasar teori yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa:

*Perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) telah membawa pengaruh terhadap politik perburuhan di Indonesia dengan lahirnya keputusan dan aturan rezim internasional yang merugikan kaum buruh seperti sistem kerja kontrak dan outsourcing, hilangnya hak-hak buruh karena adanya persaingan industri yang mengakibatkan kesejahteraan kaum buruh ikut terdesak dengan cara menekan upah buruh, sehingga memicu aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Buruh.*

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, penulis perlu membatasi jangkauan penulisannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan atau meluasnya wilayah pembahasan yang hanya akan mempersulit sebuah penelitian. Dengan ditetapkannya pembatasan penelitian, maka akan menjadi sebuah panduan bagi penulis dalam menjawab persoalan yang tengah di kaji.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajiannya pada sejauh mana *pengaruh perdagangan bebas ASEAN-China sejak kesepakatan antara ASEAN sebagai sebuah kawasan Free Trade Area dengan China melalui Free Trade Agreement (FTA) sampai tahun 2012 sehingga berdampak pada situasi dan kondisi Gerakan Buruh Di Indonesia.*

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Bila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi kita dalam mengadakan penelitian. Ada beberapa bagian yang tak terpisahkan dari metode penelitian yang penulis anggap penting untuk di sampaikan dalam karya tulis ini, diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Secara garis besar dalam ilmu sosial penelitian dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu (1) dari aplikasinya, terbagi dalam penelitian murni dan penelitian lapangan. (2) dari tujuan yang akan dicapai, terbagi dalam penelitian deskriptif, penelitian korelatif dan penelitian eksplanatif, serta penelitian

eksploratif, (3) dan dari informasi yang dicarai terbagi dalam: penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem, suatu pemikiran atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>34</sup> Karena itu penulisan karya tulis ini bersifat literer, maksudnya studi pustaka, karena diteliti dari bahan-bahan tertulis.<sup>35</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*. Data Primer di peroleh dari buku-buku yang diterbitkan. Sedangkan data Sekunder di peroleh penulis dari arsip-arsip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet, dokumenter resmi, dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Disini penulis lebih banyak bertumpu pada studi dokumen dari data yang diperoleh seperti yang sudah di sebut dalam point 2 di atas yaitu, sumberdata yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan obyek yang dikaji dalam tulisan ini. Data primer merupakan data pokok yang di jadikan oleh penulis, dan data sekunder sebagai pendukung dalam pembahasan.

---

<sup>33</sup> Muhammad Zaenuri, *Metode Penelitian Sosial (I)*, Yogyakarta: FISIP UMY, 1999, hal.6

<sup>34</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1998,Hal.63

<sup>35</sup> Tatang M.Anwar, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta;Rajawali, 1996,hal.135

#### 4. Teknik Analisis Data

Disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni jenis penelitian deskriptif, maka analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif, yaitu: menganalisi data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data.<sup>36</sup> Analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan penelaahan terhadap berbagai sumber data yang terkait baik data primer maupun data sekunder yang ada kaitannya dengan masalah yang tengah dikaji. Selanjutnya mengadakan reduksi data untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu-isu penting dalam pertanyaan, memfokuskan pengumpulan data, sampel, dan metode sampai pada kesimpulan dengan berupa abstraksi

Tahapan berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan dalam tema-tema yang lebih spesifik dengan keabsahan data yang terjaga. Terakhir adalah dengan melakukan penafsiran atau interpretasi atas teks sebagai bentuk analisa sampai pada penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian.

---

<sup>36</sup>. Masri singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 1989,hal.21

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam membuat sebuah karya ilmiah, sistematika penulisan harus dipenuhi agar lebih sistematis. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang memuat unsur-unsur metodologis meliputi; alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, metode pengumpulan data, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II**, dalam bab ini akan membahas bagaimana rezim internasional ACFTA, memaparkan mengenai gagasan dasar terkait dengan perjanjian serta pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) berikut hasil kesepakatan dari perjanjian kerjasama ACFTA.

**BAB III**, bab ini akan menjabarkan situasi dan kondisi pasca pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China, kemampuan daya saing industri domestik dengan China, kebijakan yang muncul dari peristiwa tersebut dan permasalahan yang timbul pada sektor perburuhan di Indonesia.

**BAB IV**, dalam bagian ini akan memberikan penilaian tentang bentuk-bentuk pengaruh negatif dari pelaksanaan agenda Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) yang berdampak pada bidang perburuhan Indonesia berdasarkan pada fakta-fakta yang sedang berkembang sehingga memunculkan aks-aksi gerakan buruh berikut gambaran sejarah Perburuhan dari pra kemerdekaan sampai era reformasi.

**BAB V**, merupakan kesimpulan sebagai penutup dari tulisan.